

PENULISAN SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH SEJAK
DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**



Diajukan Oleh :

Thomas Aquinas Yudha Bhuana Putra

NPM : 180513083

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

PENULISAN SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH SEJAK
DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA KERJA**



Diajukan Oleh :

Thomas Aquinas Yudha Bhuana Putra

NPM : 180513083

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH SEJAK
DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG CIPTA KERJA**



Diajukan Oleh :

Thomas Aquinas Yudha Bhuana Putra

NPM ; 180513083

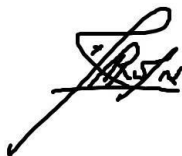
Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 28 Januari 2022



Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH SEJAK
DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Senin

Tanggal : 14 Februari 2022

Tempat : Zoom Cloud Meeting

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Sekretaris : R Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Anggota : Y Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan ,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sri Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya kepada penulis sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah Sejak Diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Tertinggi tingkat Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah turut memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam segala proses Penulisan Hukum/Skripsi ini, yaitu kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dari awal penulisan sampai siding akhir di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Kedua orang tua penulis yaitu Igantius Haryanto dan Fransiska Ninie Hardiningsih yang telah memberikan segala dukungannya hingga terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini.

3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
4. Bp.Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis terutama dalam bidang hukum kenegaraan dan pemerintahan, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas seluruh bimbingan yang telah diberikan dalam bentuk pengajaran dan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu segala proses administratif kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bapak Anton, Ibu Wiwin dan Ibu Endri sebagai narasumber yang sudah banyak memberikan pemikiran dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis.
8. Alloysius Arjunda Gema Pangestu Dicky Eliakim Siringoringo, Christophorus Dwi Putra, Yehezkiel Obey Yoneda, dan Dicky Eliakim Siringoringo selaku sahabat yang selalu ada dan memberikan dukungan

secara langsung maupun tidak langsung, serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

9. Grup Bersama Membangun Negeri yaitu Inosensia Swasti Adi Lumintasari, Laurensia Muning Harnum Damanik serta Maria Apsari Prajna Paramita yang telah memberikan dukungan yang luar biasa bagi penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini.
10. Keluarga besar Komunitas Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (KOMUTASI FH UAJY) yang sudah memberikan pembelajaran, dan pengalaman, serta menjadi wadah pengembangan diri.
11. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan skripsi.
12. Semua pihak, teman-teman dan saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan Hukum/Skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 27 Januari 2022



Thomas Aquinas Yudha Bhuana Putra

ABSTRAK

Sejak diundangkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terjadi berbagai perubahan dalam perizinan berusaha di daerah, khususnya dalam hal kewenangan Pemerintah Daerah. Penulisan hukum/ skripsi yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah Sejak Diundangkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan yang menjadi pembahasan utama dalam penulisan hukum/skripsi ini yaitu kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah serta kendala yang muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif dimana penelitian berfokus pada hukum positif. Data diperoleh dari data sekunder berupa undang-undang, buku, jurnal maupun media elektronik yang relevan dengan topik penulisan hukum, dan data primer yang bersumber dari hasil wawancara. Dalam penelitian hukum ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan kewenangan seperti izin berusaha dalam sektor pariwisata. Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha di daerah serta dalam penelitian ini ditemukan adanya kendala yang ditimbulkan baik bagi Pemerintah Daerah atau pelaku usaha setelah diundangkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, Perizinan Berusaha, *Online Single Submission*

Since the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, there have been various changes in business licensing in the regions, especially in terms of the authority of the Regional Government. The writing of the law/thesis carried out by the author is related to the authority of the regional government in providing business licensing services in the region since the promulgation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, and the main discussion in writing this law/thesis is the authority of the regional government in providing business licensing services in the regions as well as the obstacles that arose after the existence of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In this study, the normative legal method is used where the research focuses on positive law. Data obtained from secondary data in the form of laws, books, journals and electronic media relevant to the topic of legal writing, and primary data sourced from interviews. In this legal research, it can be concluded that there has been a change in authority such as business permits in the tourism sector. The Regional Government in providing business licensing services in the region and in this study it was found that there were obstacles caused either for the Regional Government or business actors after the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.

Keywords: *Local Government Authority, Business Licensing, Online Single Submission.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian	12
BAB II PEMBAHASAN.....	17
A. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	18
1. Perkembangan Pelayanan Perizinan Berusaha.....	20
2. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	24
B. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Setelah Diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	26
1. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam	

Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Berusaha Sejak Diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	27
2. Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah Sejak Diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	31
C. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah Setelah Diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	46
BAB III PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya adli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Thomas Aquinas Yudha Bhuana Putra